



LAPORAN

**PENGELOLAAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2019**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Ridho-Nya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 dapat disusun dengan baik. Penyusunan Laporan Tahunan ini berisi rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang Tahun 2019, sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang melalui keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 153 Tahun 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam laporan Tahun 2019 ini di gambarkan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi mengenai Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat, Kinerja (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, serta hambatan yang ditemui mulai dari kondisi SDM, anggaran, sampai dengan rekomendasi dan tindak lanjut.

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 ini di buat dengan harapan dapat memberikan manfaat demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Kepada semua pihak yang telah berkerja sama sampai dengan tersusunya laporan ini diucapkan terima kasih.

Pontianak, Januari 2020
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Ir. HERTI HERAWATI, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19680725 199303 2 003

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI... .. | ii |
| | |
| A. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | 1 |
| B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | 2 |
| 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik | 2 |
| a. Ruang Layanan | 2 |
| b. Penyediaan Akses Informasi..... | 3 |
| c. Sumber daya Manusia | 3 |
| d. Anggaran Pelayanan Informasi | 4 |
| C. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | 4 |
| 1. Pelayanan Informasi Publik..... | 4 |
| 2. Jenis Informasi Publik | 4 |
| 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik | 5 |
| 4. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 5 |
| D. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK..... | 6 |
| E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK..... | 6 |
| F. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI | 6 |
| | |
| DAFTAR LAMPIRAN | 8 |

PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2019

A. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk regulasi dari paradigma baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, transparan, dan akuntabel sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Informasi Publik;
4. Peraturan daerah provinsi kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
6. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 153 Tahun 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
7. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 154 Tahun 2019 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;

Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Dalam proses keterlibatan masyarakat perlu di akomodasikan dengan cara mempermudah akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan Informasi dan dokumentasi.

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Ruang Layanan

Ruang Pelayanan Informasi dan dokumentasi berada di bagian depan, berdampingan dengan ruang tunggu yang di lengkapi dengan :

- Meja dan Kursi Untuk Petugas dan Tamu
- Struktur organisasi PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

- Visi dan misi PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
- Komputer PC, Printer dan UPS
- Kipas Angin
- Blanko permohonan Informasi
- Blanko pernyataan keberatan atas permohonan informasi
- Jaringan internet
- Buku tamu

b. Penyediaan Akses Informasi

Upaya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat selain menyiapkan ruang khusus untuk pelayanan informasi dan dokumentasi, juga telah melakukan pengembangan melalui :

- Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id/id/>
- Email : admin@dislautkan.kalbarprov.go.id
- Telepon : (0561) 732521
- Fax : (0561) 766073
- Instagram : dislautkan.prov.kalbar

c. Sumber daya Manusia

Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat , telah membentuk tim dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 153 tahun 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Tugas :

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- Menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;

- Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
- Menyediakan informasi yang dikecualikan untuk di sampaikan kepada PPID; dan
- Membuat laporan dan menyampaikan kepada PPID setiap 6 (enam) bulan Sekali yang meliputi :
 - + Jumlah permohonan informasi publik yang di terima
 - + Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik
 - + Jumlah permohonan informasi publik yang di kabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang di tolak;
 - + Alasan penolakan informasi publik.

2) Fungsi

- Penghimpunan informasi publik lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- penataan dan penyimpanan informasi publik lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

d. Anggaran Pelayanan Informasi

Dukungan anggran untuk pelayanan informasi dan dokumentasi pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dibebankan pada DPA Nomor : 903/144/DPA-SKPD/BPKPD-B/2019 Tahun Anggaran 2019. Khususnya pada kegiatan Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik dan kegiatan Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor

C. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Pelayanan Informasi Publik

Jadwal layanan informasi oleh PPID pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

a. Senin s/d Kamis

- Jam Layanan : 08.00 – 15.30 WIB
- Jam Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

b. Jum'at

- Jam Layanan : 08.00 – 16.00 WIB
- Jam Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB

2. **Jenis Informasi Publik**

Dalam pelaksanaannya PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah menyediakan jenis-jenis informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat <http://dislautkan.kalbarprov.go.id/id/> :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib di umumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

3. **Jumlah Permohonan Informasi Publik**

Pelayanan informasi publik oleh PPID pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat priode Januari s/d Desember 2019 baik yang datang secara langsung (melalui desk layanan) dan melalui surat sebanyak 76 permohonan dengan rincian sebagai Berikut :

| No | Bulan | Jumlah Pemohon |
|-----|---------------|----------------|
| 1. | Januari | 6 |
| 2. | Februari | 8 |
| 3. | Maret | 9 |
| 4. | April | 7 |
| 5. | Mei | 3 |
| 6. | Juni | 1 |
| 7. | Juli | 2 |
| 8. | Agustus | 4 |
| 9. | September | 14 |
| 10. | Oktober | 5 |
| 11. | November | 12 |
| 12. | Desember | 5 |
| | Jumlah | 76 |

4. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat secara priodik dilakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang diberikan selama tahun 2019 sebagai berikut :

| | |
|-------------------|---------------|
| Nilai IKM | : 82,908 |
| Mutu Pelayanan | : A |
| Kinerja Pelayanan | : Sangat Baik |

D. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2019, tidak terjadi sengketa informasi.

E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat terdapat kekurangan dan hambatan antara lain:

1. Belum adanya persepsi atau pemahaman yang sama diantara pegawai (baik pejabat maupun staf) tentang keterbukaan informasi dan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 14 tahun 2008, sehingga hal tersebut menyebabkan respon/tanggapan yang kurang baik untuk memenuhi permohonan informasi yang berakibat pada kurang efektifnya waktu pelayanan. Mengingat permohonan informasi yang diajukan pemohon mempunyai keterbatasan waktu untuk dipenuhi dan data tersebut dapat diakses oleh publik.
2. Masih banyak informasi publik tentang kinerja dan program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat yang belum terekap dan dimasukkan dalam Daftar Informasi Yang dikuasai.
3. Belum semua data dan informasi di backup dalam bentuk soft copy dapat disimpan dalam standar TIK, ruang/space yang memadai.

F. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan perbaikan dan peningkatan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat, mengingat masih banyak terdapat kekurangan dalam hal pelayanan sampai dengan saat ini. Kedepan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan beberapa perubahan, diantara lain:

1. Mempersingkat waktu pelayanan agar lebih efektif dalam memberikan tanggapan, sehingga pemohon mendapatkan jawaban yang puas.
2. Update data yang terdapat di website PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, sehingga informasi yang di peroleh lebih lengkap.
3. Memberikan pemahaman terhadap Pelayanan Informasi Publik kepada Pejabat maupun Staf sehingga terjadi persamaan pemahaman dalam hal penyediaan data.
4. Melengkapi daftar Informasi yang dikuasai dengan menambah jumlah data informasi.

Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai proses menuju transparansi informasi kepada masyarakat, maka diharapkan pengelolaan dan penyediaan data agar lebih ditingkatkan. Untuk itu diperlukan kerjasama dan koordinasi bagi semua pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Demikian laporan tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 153 Tahun 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 154 Tahun 2019 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Daftar Informasi Publik.
4. Daftar Informasi Publik yang diusulkan untuk di kecualikan.
5. Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Visi dan Misi PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
7. Maklumat Pelayanan Informasi Publik.
8. Penetapan standar tarif /biaya pelayanan permohonan informasi.
9. Rekapitulasi Layanan Informasi Tahun 2019.
10. Dokumentasi Ruang PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
11. Dokumentasi Pelayanan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
12. Dokumentasi monitoring dan evaluasi badan Publik Tahun 2019 dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
13. Dokumentasi penerimaan penghargaan hasil monev keterbukaan informasi badan publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.(Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Barat peringkat 8 Kualifikasi Informatif / zona hijau kategori organisasi perangkat daerah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Sutan Syahrir No. 16, Telp. (0561) 732521/ Faks. (0561) 766073
PONTIANAK

Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id>

e-mail : admin@dislautkan.kalbarprov.go.id

Kode Pos : 78124

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : 153 TAHUN 2019

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, diperlukan pedoman guna menjamin tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
b. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, PPID-Pembantu dibentuk untuk membantu PPID dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.23/49/BKD-B tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.24/50/BKD-B tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**
- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : PPID Pembantu mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

- f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID; dan
- g. Membuat laporan dan menyampaikan kepada PPID setiap 6 (enam) bulan sekali, yang meliputi :
 - (1) Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - (2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - (3) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
 - (4) Alasan penolakan permohonan informasi publik

- KETIGA : PPID Pembantu melaksanakan fungsi :
- a. Penghimpunan informasi publik lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Penataan dan penyimpanan informasi publik lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Segala akibat dari terbitnya Keputusan ini adalah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

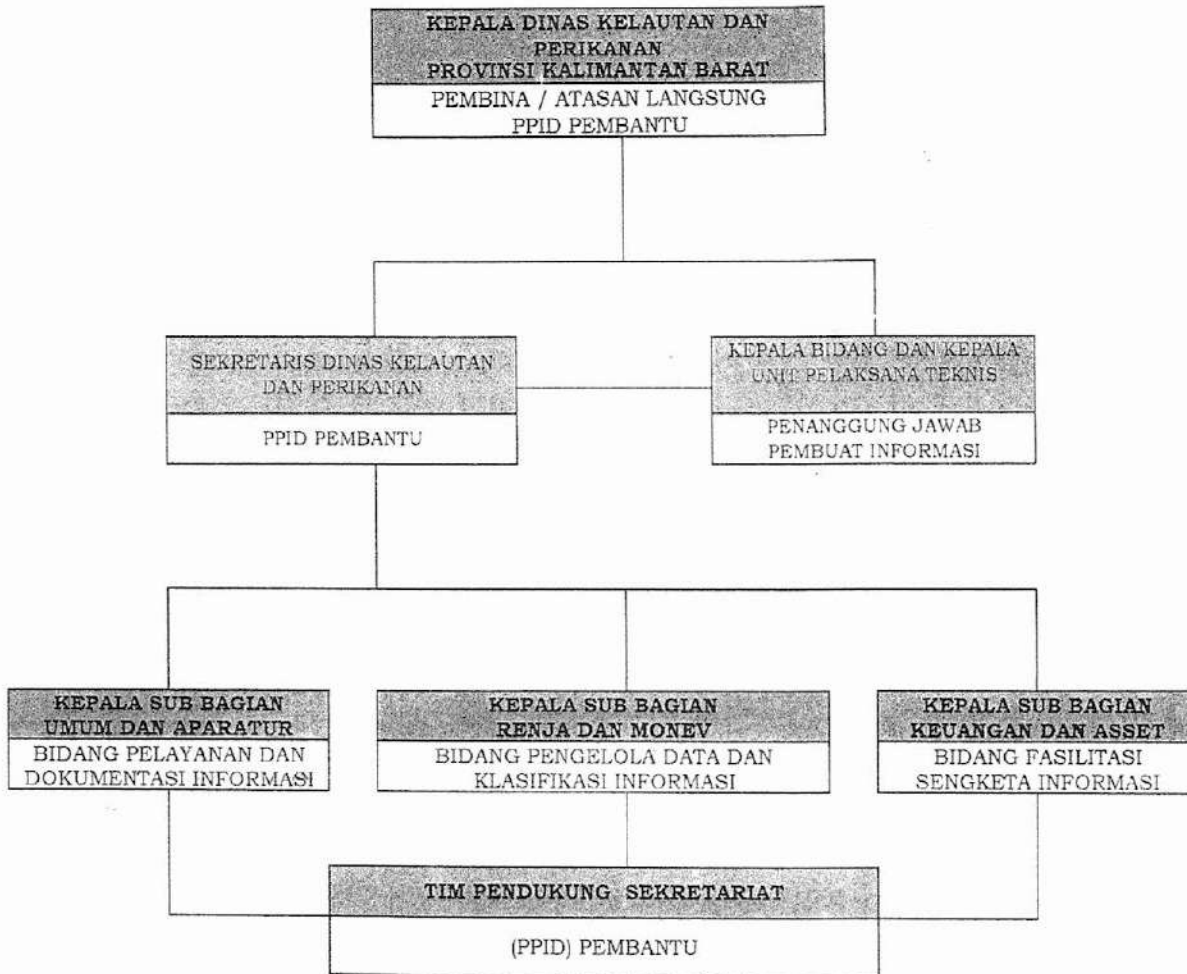
Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Agustus 2019

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



[Handwritten Signature]
HERTI HERAWATI

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



PONTIANAK, 23 AGUSTUS 2019

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HERTI HERAWATI

LAMPIRAN 2

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN**

| NO. | JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. | Pembina / Atasan Langsung PPID Pembantu. |
| 2. | Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. | Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. |
| 3. | Kepala Bidang Perikanan Tangkap. | Penanggung Jawab Pembuatan Informasi Bidang Perikanan Tangkap. |
| 4. | Kepala Bidang Perikanan Budidaya | Penanggung Jawab Pembuatan Informasi Bidang Perikanan Budiadaya. |
| 5. | Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan. | Penanggung Jawab Pembuatan Informasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan. |
| 6. | Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan. | Penanggung Jawab Pembuatan Informasi Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan. |
| 7. | Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan. | Penanggung Jawab Pembuatan Informasi sesuai Tupoksinya. |
| 8. | Kepala UPT Pelabuhan Perikanan | Penanggung Jawab Pembuatan Informasi sesuai Tupoksinya. |
| 9. | Kepala UPT Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut. | Penanggung Jawab Pembuatan Informasi sesuai Tupoksinya. |
| 10. | Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur | Penanggung Jawab Pelayanan dan Dokumentasi Informasi |
| 11. | Kepala Sub Bagian Renja dan Monev. | Penanggung Jawab Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi |
| 12. | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset | Penanggung Jawab Fasilitasi Sengketa Informasi |

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HERTI HERAWATI

LAMPIRAN 3

**TIM PENDUKUNG SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

| NO. | JABATAN POKOK/NAMA | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Jamianto, S.Pi | Koordinator |
| 2. | Hasan, S.Pi | Anggota |
| 3. | M. Nasir, S.Pi | Anggota |
| 4. | Desi Hervina Dewi, S.Pi | Anggota |
| 5. | Sutrisno, A.Md | Anggota |
| 6. | Nova Adytyanto, SE | Anggota |
| 7. | Wahdatun Hasanah | Anggota |

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HERTI HERAWATI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sutan Syahrir No. 16, Telp. (0561) 732521/ Faks. (0561) 766073

PONTIANAK

Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id>

e-mail : dislautkan@kalbarprov.go.id

Kode Pos : 78124

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : 154 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2019**

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah berkewajiban membuat Daftar Informasi Publik;
 - d. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan mempertimbangkan perkembangan informasi di Lapangan, perlu Penetapan Daftar Informasi Publik setiap tahun;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2019 di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
10. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 153 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar informasi publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan.
- KETIGA : Informasi publik yang wajib disediakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 Agustus 2019

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat selaku PPID Utama
5. Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Lampiran

Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Nomor : 154 Tahun 2019

Tanggal : 27 Agustus 2019

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

| NO | NAMA INFORMASI | PEJABAT YANG Menguasai/ PENANGGUNG JAWAB | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN |
|----|--|---|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Alamat Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalbar | Kasubbag Urum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 2 | Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalbar | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 3 | Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 4 | Laporan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 2018 | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 5 | Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 6 | Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 7 | Profil Pimpinan Badan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 8 | Program dan Kegiatan Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2019 (RKA 2019) | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 9 | Penanggungjawab Program / Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 10 | Target dan Capaian Program serta Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |

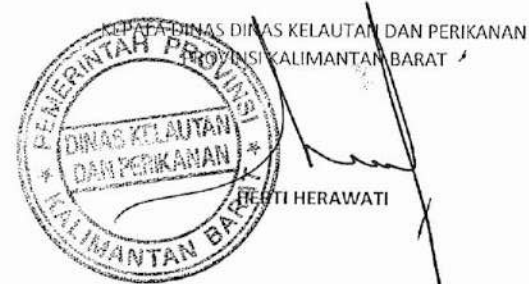
| | | | | | | |
|----|---|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|
| 11 | Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 12 | DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2018 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 13 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 14 | TAPKIN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 15 | NERACA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag, Keuangan dan Asset | Sekretaris | 2018 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 16 | Laporan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2018 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 17 | LHKPN Pejabat yang di verifikasi KPK | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 18 | Register Permohonan Informasi Publik | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 19 | Ringkasan Laporan Layanan Informasi | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 20 | SK Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 | Sekretaris | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 21 | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang yang di lakukan Pejabat badan Publik | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |

II. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

| NO | NAMA INFORMASI | PEJABAT YANG Menguasai/ PENANGGUNG JAWAB | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN |
|----|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Informasi Prakiraan Cuaca | Bidang Perikanan Tangkap | Bidang Perikanan Tangkap | 2019 Pontianak | Hard Copy | - |
| 2 | Informasi Prakiraan Tinggi Gelombang | Bidang Perikanan Tangkap | Bidang Perikanan Tangkap | 2019 Pontianak | Hard Copy | - |

III. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

| NO | NAMA INFORMASI | PEJABAT YANG MENGUASAI/ PENANGGUNG JAWAB | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN |
|----|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2018 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 5 Tahun |
| 2 | SOP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalbar | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2017 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 3 | Daftar Pegawai Negeri SIPIL (PNS) Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalbar | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 4 | Data Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan | Kasubbag Keuangan dan Aset (Sekretariat) | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 5 | Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag, Renja dan Monev | Sekretaris | 2018 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 5 Tahun |
| 6 | Laporan Inventarisasi Asset | Kasubbag Keuangan dan Aset (Sekretariat) | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 7 | Peraturan / Kebijakan / Keputusan | Kepala Bidang KP3K | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 2019 | Hard Copy Soft Copy | - |
| 8 | Perjanjian Dengan Pihak Ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa | Kasubbag Keuangan dan Asset | Sekretaris | 2018 Pontianak | Hard Copy | 1 Tahun |



DAFTAR INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2019

UNIT ESELON II : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV KALBAR

Berdasarkan OPD Penerbit : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalbar
 Berdasarkan Tahun : 2019
 Sampai Dengan Tahun : 2019

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

| NO | NAMA INFORMASI | PEJABAT YANG Menguasai/ PENANGGUNG JAWAB | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN |
|----|---|---|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Alamat Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalbar | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 2 | Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalbar | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 3 | Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 4 | Laporan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 2018 | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 5 | Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 6 | Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 7 | Profil Pimpinan Badan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 8 | Program dan Kegiatan Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2019 (RKA 2019) | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 9 | Penanggungjawab Program / Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |

| NO | NAMA INFORMASI | PEJABAT YANG Menguasai/ PENANGGUNG JAWAB | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN |
|----|---|---|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Target dan Capaian Program serta Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 11 | Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 12 | DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2018 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 13 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 14 | TAPKIN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 15 | NERACA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag, Keuangan dan Asset | Sekretaris | 2018 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 16 | Laporan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2018 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 17 | LHKPN Pejabat yang di verifikasi KPK | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 18 | Register Permohonan Informasi Publik | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 19 | Ringkasan Laporan Layanan Informasi | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 20 | SK Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 | Sekretaris | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 21 | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang yang di lakukan Pejabat badan Publik | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |

II. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

| NO | NAMA INFORMASI | PEJABAT YANG Menguasai/ PENANGGUNG JAWAB | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN |
|----|---|---|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Alamat Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalbar | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |

| NO | NAMA INFORMASI | PEJABAT YANG Menguasai/ PENANGGUNG JAWAB | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN |
|----|--|---|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalbar | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 3 | Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 4 | Laporan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 2018 | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 5 | Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 6 | Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 7 | Profil Pimpinan Badan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 8 | Program dan Kegiatan Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2019 (RKA 2019) | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 9 | Penanggungjawab Program / Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 10 | Target dan Capaian Program serta Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 11 | Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 12 | DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2018 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 13 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 14 | TAPKIN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 15 | NERACA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag, Keuangan dan Asset | Sekretaris | 2018 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 16 | Laporan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2018 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 17 | LHKPN Pejabat yang di verifikasi KPK | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 18 | Register Permohonan Informasi Publik | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |

| NO | NAMA INFORMASI | PEJABAT YANG Menguasai/ PENANGGUNG JAWAB | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN |
|----|---|---|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | Ringkasan Laporan Layanan Informasi | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 20 | SK Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 | Sekretaris | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 21 | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang yang di lakukan Pejabat badan Publik | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |

III. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

| NO | NAMA INFORMASI | PEJABAT YANG Menguasai/ PENANGGUNG JAWAB | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN |
|----|--|---|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Daftar Pegawai Negeri SIPIL (PNS) Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalbar | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 2 | SOP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalbar | Kasubbag Umum dan Aparatur | Sekretaris | 2017 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | - |
| 3 | Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 | Kasubbag Rencana Kerja dan Monev | Sekretaris | 2018 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 5 Tahun |
| 4 | Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat | Kasubbag, Renja dan Monev | Sekretaris | 2018 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 5 Tahun |
| 5 | Perjanjian Dengan Pihak Ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa | Kasubbag Keuangan dan Asset | Sekretaris | 2018 Pontianak | Hard Copy | 1 Tahun |
| 6 | Laporan Inventarisasi Asset | Kasubbag Keuangan dan Aset (Sekretariat) | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 7 | Data Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan | Kasubbag Keuangan dan Aset (Sekretariat) | Sekretaris | 2019 Pontianak | Hard Copy Soft Copy | 1 Tahun |
| 8 | Peraturan / Kebijakan / Keputusan | Kepala Bidang KP3K | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 2019 | Hard Copy Soft Copy | - |



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sutan Syahrir No. 16, Telp. (0561) 732521/ Faks. (0561) 766073
PONTIANAK

Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id>

e-mail : admin@dislautkan.kalbarprov.go.id

Kode Pos : 78124

USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

| No. | Judul Informasi | Keterangan |
|-----|---|---|
| 1. | Dokumen Rincian Harga Penawaran dari Penyedia Barang dan Jasa. | Jika dibuka akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat, membuka rahasia perusahaan. |
| 2. | Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan | Jika dibuka dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. |
| 3. | Laporan Hasil Pengujian Mutu Produk Perikanan | Jika dibuka dapat menghambat proses pembinaan, pengawasan. |

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Barat,



I. HERTI HERAWATI, MMA

Pembina Utama Muda

NIP. 19680725 199303 2 003

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



PONTIANAK, 23 AGUSTUS 2019
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
TTD

HERTI HERAWATI

PPID PEMBANTU

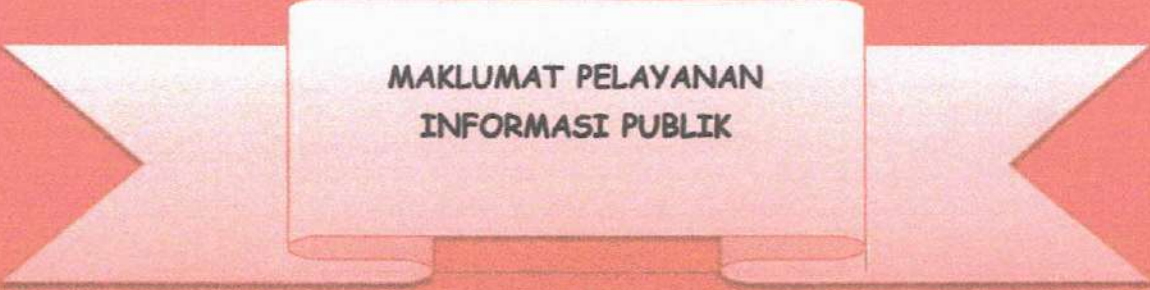
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

VISI

**TERWUJUDNYA PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK YANG PROFESIONAL,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

MISI

- 1. MENINGKATKAN KUALITAS SDM DALAM
PENGELOLAAN DOKUMENTASI INFORMASI PUBLIK**
- 2. MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**
- 3. MENINGKATKAN AKSEBILITAS MASYARAKAT
TERHADAP INFORMASI PUBLIK**
- 4. MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN
TEPAT, CEPAT, MUDAH DAN SEDERHANA**



**MAKLUMAT PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP
MENYEDIAKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SESUAI TUGAS DAN
FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA PEMOHON INFORMASI PUBLIK
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU.

**PENETAPAN STANDAR TARIF/BIAYA
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI**

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat menyediakan Informasi Publik secara gratis (tidak dipungut biaya).

Untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan *photo copy* sendiri atau menyediakan CD/DVD kosong atau *flashdisk* untuk perekaman data dan informasinya.”

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI
TAHUN 2019**

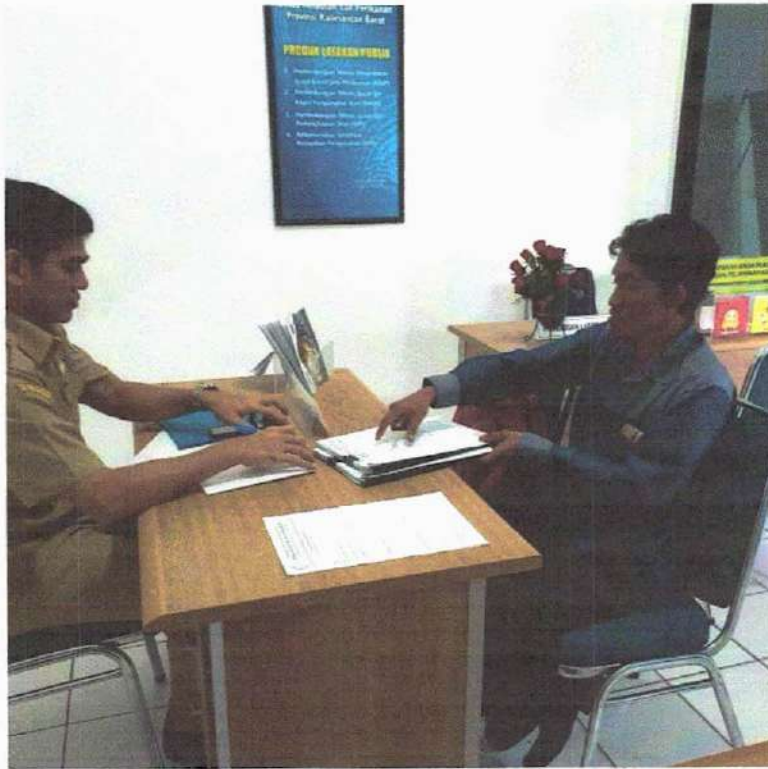
| NO. | PEMOHON INFORMASI | WAKTU YANG DIPERLUKAN | PERMOHONAN INFORMASI | | | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------|---------------------------|
| | | | DIKABULKAN SELURUHNYA | DIKABULKAN SEBAGIAN | DITOLAK | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah/Permintaan Data Dalam Rangka Penetapan Uang Persediaan/(UPT)OPD/Biro/UPT di lingkup | 4 Hari | √ | | | Diterima 8 Januari 2019 |
| 2 | Univ.Fak Teknik Untan / Permohonan Data | 4 Hari | √ | | | Diterima 8 Januari 2019 |
| 3 | Kanwil DJP Pontianak / Permintaan data IUP | 3 Hari | √ | | | Diterima 11 Januari 2019 |
| 4 | Dinas Pangan.Pertanian, Perikanan Kota Pontianak /Data Angka Komsumsi Ikan Kota Pontianak | 3 Hari | √ | | | Diterima 14 Januari 2019 |
| 5 | Ditjen Perikanan Budidaya / Permintaan Ulang data/Frofil Infrastruktur Irigrasi Perikanan Budidaya | 4 Hari | √ | | | Diterima 15 Januari 2019 |
| 6 | Univ.Fak Teknik Untan / Permohonan Data | 4 Hari | √ | | | Diterima 24 Januari 2019 |
| 7 | Devi / Univ.Muhammadiyah Fak.Ekonomi Dan Bisnis /Permohonan Data Untuk Penyusunan Skripsi | 3 Hari | √ | | | Diterima 9 Februari 2019 |
| 8 | KKP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya /Data UPTD,UPR dan HSRT/IPC Port Devloper / Permohonan Data Peta RZWP3K | 4 Hari | √ | | | Diterima 10 Februari 2019 |
| 9 | Univ.Fak Teknik Untan / Permohonan Data | 4 Hari | √ | | | Diterima 29 Februari 2019 |
| 10 | Univ.Fak Teknik Untan / Permohonan Data | 4 Hari | √ | | | Diterima 29 Februari 2019 |
| 11 | Badan Pusat Statistik / Permohonan Data Lingkungan Hidup | 3 Hari | √ | | | Diterima 29 Februari 2019 |
| 12 | An. Keneng / Univ.Fak Teknik Untan / Permohonan Data | 3 Hari | √ | | | Diterima 2 Maret 2019 |
| 13 | An. Maris Stella/ Univ.Fak Teknik Untan / Permohonan Data | 3 Hari | √ | | | Diterima 2 Maret 2019 |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan /Permintaan Data Serta Saran atau Masukkan Draf SK Satgas IDM/Prov.Kalbar | 3 Hari | √ | | | Diterima 4 Maret 2019 |
| 15 | Univ.Muhammadiyah Fak.Ekonomi / Permohonan Data Untuk /Penyusunan Skripsi | 5 Hari | √ | | | Diterima 10 Maret 2019 |
| 16 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Badan Pengelolaan Keuangan /Dan Pendapatan Daerah / Updating Data Tenaga Kontrak | 4 Hari | √ | | | Diterima 17 Maret 2019 |
| 17 | Dian Fitriana / Univ.Fak Teknik Untan / Permohonan Data | 4 Hari | √ | | | Diterima 2 April 2019 |
| 18 | Ditjen Perikanan Tangkap / Permohonan Data | 4 Hari | √ | | | Diterima 2 April 2019 |
| 19 | Afli Audiyon dkk / Politeknik Negeri Ptk / Permohonan Data dan Wawancara | 3 Hari | √ | | | Diterima 21 Maret 2019 |
| 20 | Ditjen Perikanan Tangkap / Permohonan Data Dalam Rangka/Rakerda DJPT Th 2019 | 4 Hari | √ | | | Diterima 28 Maret 2019 |
| 21 | Univ. Fak Teknik Untan / Permohonan Data | 4 Hari | √ | | | Diterima 2 April 2019 |
| 22 | BNN Kalbar / Permohonan Data Dalam Bentuk RTL | 3 Hari | √ | | | Diterima 17 Mei 2019 |
| 23 | Inspektorat Prov. / Permohonan Data Perkembangan/Tindak Lanjut Hasil Peneawasan (TLHP) | 3 Hari | √ | | | Diterima 17 Mei 2019 |
| 24 | Univ. Fak Teknik Untan / Permohonan Data | 3 Hari | √ | | | Diterima 17 Mei 2019 |
| 25 | Ditjen Perikanan Budidaya / Permohonan Data Ikan Hias | 4 Hari | √ | | | Diterima 2 April 2019 |
| 26 | Badan Pusat Statistik / Permohonan Data Pengiriman/Softcopy Kalbar dalam Angka 2018 | 4 Hari | √ | | | Diterima 12 April 2019 |
| 27 | Univ. Fak Teknik Untan / Permohonan Data | 3 Hari | √ | | | Diterima 19 April 2019 |
| 28 | Univ. Fak Teknik Untan / Permohonan Data | 3 Hari | √ | | | Diterima 19 April 2019 |
| 29 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan /Permintaan Data | 3 Hari | √ | | | Diterima 25 April 2019 |
| 30 | Pemprov Kalbar, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah/Permintaan Data | 3 Hari | √ | | | Diterima 25 April 2019 |
| 31 | Ditjen Pengawasan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan /Permohonan Data UPI Unggulan | 4 Hari | √ | | | Diterima 28 Juni 2019 |
| 32 | Untan / Permohonan Data | 4 Hari | √ | | | Diterima 7 JULI 2019 |
| 33 | Tan Tong Seng / Penangkap Ikan | 4 Hari | √ | | | 7 JULI 2019 |
| 34 | Dinas Pangan.Pertanian Perikanan Kota Pontianak /Data Pembangunan Kelautan/Dan Perikanan Seksi Perikanan Tangkan | 4 Hari | √ | | | Diterima 20 JULI 2019 |
| 35 | Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan / Permohonan Data | 3 Hari | √ | | | Diterima 8 Agustus 2019 |
| 36 | CV. Mitra Alam Perkasa / Permohonan Rekom Kelayakan Pengolahan | 4 Hari | √ | | | 11 Agustus 2019 |
| 37 | BPSDM / Permintaan Data Agen Pelaksanaan FGD Pengembangan Kompetisi | 4 Hari | √ | | | Diterima 18 Agustus 2019 |
| 38 | Amalia Nabella Putri/Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo gg. Batas Pandang / Sejarah Kantor,Visi Misi, Struktur Organisasi Tupoksi, Jumlah Pegawai | 3 Hari | √ | | | Diterima 23 Agustus 2019 |
| 39 | Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan / Permohonan Inventarisasi Data Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil | 4 Hari | √ | | | Diterima 29 Agustus 2019 |

| NO. | PEMOHON INFORMASI | WAKTU YANG DIPERLUKAN | PERMOHONAN INFORMASI | | | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------------------|
| | | | DIKABULKAN SELURUHNYA | DIKABULKAN SEBAGIAN | DITOLAK | |
| 40 | Amalia Nabella Putri/Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo gg. Batas Pandang / Jumlah Pegawai, Tugas dan fungsi Kantor, Bidang-bidang | 4 Hari | √ | | | Diterima 6 septeber 2019 |
| 41 | Reny Rianti /Dr.Sutomo No.1 /Restra, Inventarisasi data Budidaya/Data Statistik Perikanan | 3 Hari | √ | | | Diterima 6 septeber 2019 |
| 42 | Yosef B.Danang Tri H /GBA I K-34 Bandung-40288/Informasi Wilayah Budidaya (potensi) Pengembangan Tambak di Kab. Sambas | 4 Hari | √ | | | Diterima 6 septeber 2019 |
| 43 | Judia / Jl. Apel Ruko Samping gg Puring no 1 a / Mengurus rekam | 3 Hari | √ | | | 10 Seprtember 2019 |
| 44 | Adehar / Mempawah / Tentang Kapal Nelayan | 3 Hari | √ | | | Diterima 11 Seprtember |
| 45 | Juliawan / Jl. Cendrawasih NO 59 B / Surat Ijin Kapal | 3 Hari | √ | | | 11 Seprtember 2019 |
| 46 | Yanmardi , S/BPSPL Pontianak / Data Terumbu Karang Terbaru /Data Lamun Terbaru, Data Ikan yang Terbaru | 3 Hari | √ | | | Diterima 11 Seprtember 2019 |
| 47 | Sulaiman Yusup Rizal / Pontianak/ Data Statistik Kecamatan (Hasil Tangkapan, Armada, Rumah tanggapan nelayan, jumlah nelayan, Pelabuhan Sekalbar) | 4 Hari | √ | | | Diterima 11 Seprtember 2019 |
| 48 | Oktavianus Andri /Komplek Mutiara Mas No B.5 Sei Raya Dalam Pembuatan SKP | 3 Hari | √ | | | 12 Seprtember 2019 |
| 49 | Kinanto/ Dusun Nirwana (Sui Kakap) /Permohonan Surat Tanda Andon (STKA) | 4 Hari | √ | | | Diterima 16 Seprtember 2019 |
| 50 | Agustinus Lasimon /Jl.Purnama komp.Purnama Griya /Permohonan Surat Tanda Andon (STKA) | 4 Hari | √ | | | Diterima 16 Seprtember 2019 |
| 51 | Kantor Pertanahan Sintang/Permintaan Data Akses Reform Dalam Bentuk By Name By Address atas Sertifikasi Lintas Sektor th 2014-2018 | 5 Hari | √ | | | Diterima 8 Oktober 2019 |
| 52 | Untan Fak. Hukum/Permintaan Data*Penegakan Hukum Terhadap pelaku Tindak Pidana/Penangkapan Ikan Menggunakan Pukat (Trawls) Di Kab.Kayong Utara | 5 Hari | √ | | | Diterima 8 Oktober 2019 |
| 53 | Siron Tamba (DISPERINDAG)/Data Potensi kelautan dan Perikanan/Untuk pengembangan Industri di Bid Perikanan | 5 Hari | √ | | | Diterima 15 Oktober 2019 |
| 54 | Hendry Hotel Maestro/Rencana Kegiatan Follow Up | 1 Hari | √ | | | Diterima 15 Oktober 2019 |
| 55 | Zulkifli Konsultan Quisioner Dan Indentifikasi Masalah RU | 1 Hari | √ | | | Diterima 3 November 2019 |
| 56 | M.Fadli/ Jakarta/PNS (BRSDM KKP)/Penelitian Perairan laut | 3 Hari | √ | | | Diterima 7 November 2019 |
| 57 | Steven Greatness/Jl. Sui Raya Dalam no. 38/Perdagangan/Konsultasi Prosudur SKP/Untuk Eksport | 1 Hari | √ | | | Diterima 7 November 2019 |
| 58 | Santy Wahyuni/Jl. Paris 2/Koordinasi Pelaksanaan Kawasan Minapolitan/Kegiatan Peninjauan RTRW Kab. Sambas | 2 Hari | √ | | | Diterima 11 November 2019 |
| 59 | Hotel Kapuas Drama/Jl. Imam Bonjol no. 89/Swasta/Koordinasi /Memberikan Penawaran Th 2020 | 1 Hari | √ | | | Diterima 11 November 2019 |
| 60 | Gusti Syamsul Hairi,S.Pi/Sukadana/PNS / Rencana Kegiatan Th 2020-2021 | 3 Hari | √ | | | Diterima 18 November 2019 |
| 61 | Gusti Syamsul Hairi,S.Pi/Sukadana/PNS /Alur Pembinaan Untuk Kelompok Pembudidaya/Untuk/ Rencana Kegiatan Th 2020-2021 | 3 Hari | √ | | | Diterima 18 November 2019 |
| 62 | Akmal/BPBAT Mandiangin Kaisei/PNS /Layanan Koordinasi | 1 Hari | √ | | | Diterima 18 November 2019 |
| 63 | Sampurno/Jl. Budi Karya No.34 B/Perdagangan/Meminta Surat Rekomendasi | 1 Hari | √ | | | Diterima 18 November 2019 |
| 64 | Erni Oktaviyani/Jl. Gajah Mada No. 177/Swasta/Koordinasi /Memberikan Penawaran Th 2020 | 1 Hari | √ | | | Diterima 20 November 2019 |
| 65 | Ade Harry/Jl. Flamboyan Ketapang/PNS/Koordinasi Kegiatan Usulan Biotlog/Untuk Meningkatkan Sepnas Kelompok | 1 Hari | √ | | | Diterima 25 November 2019 |
| 66 | Ghina Afini Capriditi/Parit Bugis Kubu Raya/PNS /Konfirmasi Undangan Seminar/Untuk Memastikan Undangan Seminar Sudah diterima atau Belum | 1 Hari | √ | | | Diterima 25 November 2019 |
| 67 | Team Invesigasi/Wartawan/Permintaan Informasi/Pemberitaan | 1 Hari | √ | | | Diterima 10 Desember 2019 |
| 68 | Drs.Sahmanto/Jl. K.H.A Dahlan gg. Balsa no 2/Swasta/Tentang Budidaya | 1 Hari | √ | | | Diterima 10 Desember 2019 |
| 69 | Adi Mulia/Jl. H.Agus Salim gg Pipit/PNS/Peta Kelautan/Untuk keperluan Izin Tempat TMKM Ketapang | 1 Hari | √ | | | Diterima 17 Desember 2019 |
| 70 | Reddy Apriano/Jl. Kresna (Jatim)/Karyawan/Budidaya Ikan/Membangun Budidaya Ikan | 1 Hari | √ | | | Diterima 23 Desember 2019 |
| 71 | Onesimus Dhyas/Jl. Pramuka gg Kenari 11/Dosen Politeknik Negri Sambas/Informasi Terkait Pengembangan Potensi Perikanan sambas/Mengembangkan Potensi Perikanan di Sambas | 1 Hari | √ | | | Diterima 23 Desember 2019 |

Dokumentasi Ruangan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019



Dokumentasi Pelayanan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019



Dokumentasi Monitoring Dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2019 Dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat



Dokumentasi Penerimaan Penghargaan Hasil Money Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019





**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**LAMPIRAN : SURAT KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 171/B/KI-Kalbar/12/2019
TANGGAL : 02 Desember 2019**

REKAPITULASI

**PENETAPAN KUALIFIKASI PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK PER KATEGORI
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019**

A. KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGK. PEMPROV KALBAR

| PERINGKAT | NAMA BADAN PUBLIK | KUALIFIKASI | ZONASI |
|------------------|--|--------------------|---------------|
| 1 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | INFORMATIF | HIJAU |
| 2 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN BARAT | INFORMATIF | HIJAU |
| 3 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | INFORMATIF | HIJAU |
| 4 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDARSO PONTIANAK | INFORMATIF | HIJAU |
| 5 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. KALBAR | INFORMATIF | HIJAU |
| 6 | DINAS SOSIAL PROV. KALBAR | INFORMATIF | HIJAU |
| 7 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. KALBAR | INFORMATIF | HIJAU |
| 8 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KALBAR | INFORMATIF | HIJAU |
| 9 | DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT | INFORMATIF | HIJAU |
| 10 | DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | INFORMATIF | HIJAU |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. KALBAR | INFORMATIF | HIJAU |
| 12 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. KALBAR | INFORMATIF | HIJAU |
| 13 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROV. KALBAR | INFORMATIF | HIJAU |